



Kinerja Puskesmas Poleang dalam Pelaksanaan Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Phbs) di Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Sazki Azizah Universitas Sembilanbelas November Kolaka sazkyazizah12@gmail.com	ISSN: 2963-8933 Vol. 6, No. 1, April 2026 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp
La Ode Asrun Azis R Universitas Sembilanbelas November Kolaka	
Ahmad Farouq Mulku Zahari Universitas Sembilanbelas November Kolaka	

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Azizah, S., Azis R, L. O. A., & Zahari, A. F. M. (2026). Kinerja Puskesmas Poleang dalam Pelaksanaan Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Phbs) di Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 6 (1), 601-613.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Puskesmas Poleang Dalam Pelaksanaan Program perilaku Hidup Bersih dan Sehat menggunakan teori kinerja organisasi menurut Dwiyanto dalam Nugraha (2020), yang mencakup Produktivitas, Kualitas layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan informan yang ditentukan melalui teknik purposive sampling, terdiri dari tenaga Kesehatan puskesmas, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja puskesmas poleang dalam pelaksanaan program PHBS tergolong cukup baik, namun belum optimal. Dari aspek produktivitas, puskesmas telah melaksanakan penyuluhan, pemantauan jamban, pendampingan rumah tangga sehat, serta kegiatan lintas sektor secara rutin, tetapi masih terkendala rendahnya partisipasi masyarakat dan lambatnya perubahan perilaku kesehatan. Dari aspek kualitas layanan, edukasi kesehatan berjalan melalui media informasi dan posyandu, namun respon dan pemahaman masyarakat masih rendah akibat metode penyampaian yang kurang sesuai dan keterbatasan sarana seperti jamban sehat. Dari aspek responsivitas, puskesmas telah menanggapi kebutuhan masyarakat, meski dukungan sumber daya belum merata. Pada aspek responsibilitas, pelaksanaan program telah mengikuti pedoman dan prosedur, tetapi tingkat partisipasi masih menjadi hambatan. Dari aspek akuntabilitas, puskesmas telah mempertanggungjawabkan kegiatan melalui pelaporan rutin dan koordinasi lintas sektor, tetapi transparansi terkait evaluasi program masih perlu ditingkatkan

Kata Kunci: Kinerja Puskesmas, Program PHBS, Organisasi.

Abstract

This study aims to determine the performance of the Poleang Community Health Center (Puskesmas) in implementing the Clean and Healthy Living Behavior (PHBS) program using Dwiyanto's organizational performance theory in Nugraha (2020), which includes productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. This study used a descriptive qualitative approach with informants determined through purposive sampling technique, consisting of health workers from the community health center, sub-district government, village government, and the community. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The results indicate that the performance of the Poleang Community Health Center in implementing the PHBS program is quite good, but not yet optimal. In terms of productivity, the community health center has routinely conducted outreach, toilet monitoring, healthy household assistance, and cross-sectoral activities, but is still hampered by low community participation and slow changes in health behavior. In terms of service quality, health education is carried out through information media and integrated health posts (Posyandu), but community response and understanding are still low due to inappropriate delivery methods and limited facilities such as healthy latrines. In terms of responsiveness, community health centers (Puskesmas) have responded to community needs, although resource support has been uneven. In terms of responsibility, program implementation has followed guidelines and procedures, but participation remains a barrier. In terms of accountability, Puskesmas have been accountable for their activities through routine reporting and cross-sector coordination, but transparency regarding program evaluation still needs improvement.

Keywords: Puskesmas Performance, PHBS Program, Organization.

A. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia mengadakan program untuk mendorong gaya hidup sehat di masyarakat yang di kenal sebagai Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Program PHBS meliputi lima aspek, yaitu di lingkungan rumah tangga, tempat kerja, fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, dan tempat umum. PHBS adalah praktik perilaku masyarakat atau individu yang didasari oleh kesadaran, hasil dari proses pembelajaran sehingga memungkinkan seseorang, kelompok, keluarga, atau komunitas untuk mandiri dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat. Basis utama untuk mencapai kesehatan masyarakat dalam konteks PHBS adalah lingkungan rumah tangga, karena rumah tangga merupakan sumber utama pembentukan perilaku hidup bersih dan sehat (Nasution 2020).

Pentingnya menerapkan gaya hidup sehat bagi setiap individu tidak bisa di abaikan karena mengingat kesehatan memiliki manfaat yang sangat signifikan bagi manusia. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik itu konsentrasi dalam bekerja maupun beraktivitas, Kesehatan pribadi serta kesehatan anggota keluarga sangatlah krusial untuk mencapai keharmonisan keluarga. Menciptakan gaya hidup sehat sebenarnya sangatlah mudah dan murah, terutama jika di dibandingkan dengan biaya yang harus di keluarkan untuk pengobatan saat mengalami gangguan kesehatan. Banyak orang baru berusaha mengobati setelah menderita penyakit, yang akhirnya mendatangkan kerugian bagi mereka yang mengalaminya (Nurhajati 2015).

Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan pedoman pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS), yang diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011. Dalam pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat di seluruh Indonesia dengan mengikuti pola manajemen PHBS, yang mencakup tahapan pembinaan, pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan penilaian. Upaya ini dilakukan untuk memberdayakan masyarakat agar mereka dapat memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatannya. Dengan demikian, masyarakat menjadi sadar, mau, dan mampu secara mandiri untuk ikut aktif dalam meningkatkan status kesehatannya.

Dalam hal ini sanitasi yang buruk berdampak pada masalah serius dengan dampak yang sangat besar pada kesehatan masyarakat. Lingkungan yang kotor dapat menjadi sarang pathogen dan faktor penyakit seperti nyamuk dan lalat. Akibatnya, penyakit menular seperti diare, kolera, disentri, dan virus lainnya yang mudah menyebar. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan di negara berkembang, di mana diare menjadi penyebab utama kematian anak di bawah lima tahun. Salah satu dampak nyata dari sanitasi buruk adalah tingginya angka kematian akibat diare, terutama pada anak-anak. Menurut UNICEF, kurangnya akses ke sanitasi memadai menyebabkan sekitar 432.0000 kematian setiap tahun karena diare. Tidak hanya diare, penyakit lainnya seperti kolera, disentri, dan tifus juga sering terjadi di lingkungan dengan sanitasi buruk. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya sanitasi dan kebiasaan hidup bersih di beberapa masyarakat, terutama di daerah perdesaan, memperparah kondisi ini.

Upaya meningkatkan akses fasilitas sanitasi, yaitu dengan melakukan edukasi terkait pentingnya sanitasi, dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat sangat penting untuk mengurangi beban penyakit

dan kematian akibat sanitasi yang buruk. investasi dan infrastruktur sanitasi, pendidikan tentang sanitasi, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat adalah langkah-langkah efektif untuk mengatasi masalah ini. Dengan perhatian dan upaya Bersama, masalah sanitasi yang buruk dapat dikurangi dan Kesehatan masyarakat dapat meningkat secara signifikan (Hendriarianti et al. 2024).

Dalam bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit serta penyehatan lingkungan, praktik yang di anjurkan untuk di lakukan meliputi mencuci tangan dengan sabun, pengelolaan air minum dan makanan yang higienis, penggunaan air bersih, penggunaan jamban yang sehat, pengelolaan limbah cair yang memenuhi standar, pemberantasan jentik nyamuk, serta tidak merokok dalam ruangan, dan lain sebagainya. Dalam bidang kesehatan ini ibu dan anak serta keluarga berencana, di anjurkan untuk meminta bantuan persalinan dari tenaga Kesehatan, menimbang balita setiap bulan, imunisasi lengkap bayi, menjadi peserta keluarga berencana, dan lain sebagainya. Dalam bidang gizi dan farmasi, di anjurkan untuk menerapkan pola makan dengan gizi yang seimbang, mengonsumsi tablet tambah darah selama kehamilan, memberikan ASI eksklusif kepada bayi, mengonsumsi garam beryodium, dan sebagainya. Sedangkan dalam bidang pemeliharaan kesehatan, di anjurkan untuk berpartisipasi dalam jaminan pemeliharaan kesehatan, aktif mengelola atau memanfaatkan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), serta memanfaatkan puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah elemen kunci dalam upaya meningkatkan perilaku hidup sehat di masyarakat. Program PHBS di rumah tangga bertujuan untuk memberdayakan setiap anggota keluarga agar mereka mengetahui, bersedia, dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta turut serta dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Meskipun program pembinaan PHBS yang di luncurkan pemerintah telah berjalan cukup lama, kenyataannya pencapaiannya belum memenuhi harapan (Herlina, Lisnawati, and Muhammad Arsyad 2018).

PHBS merupakan metode untuk mengajarkan perilaku kepada individu, membuka peluang bagi keluarga, kelompok, dan masyarakat. Saluran komunikasi berperan penting dalam memberikan informasi serta pelatihan guna meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Dalam program ini di mulai dari struktur rumah tangga atau keluarga karena setiap rumah tangga adalah aset penting untuk pembangunan ke depan. Oleh karena itu, pentingnya rumah tangga harus di pertahankan, di kembangkan, dan di lindungi (Kurnia and Edwar 2022).

Gambaran mengenai kinerja puskesmas dalam pelaksanaan program PHBS dapat di lihat pada penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Listiawaty (2020). Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Pelaksanaan Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pada Tatanan Rumah Tangga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga yang bertugas dalam program ini cukup, tetapi belum optimal karena belum ada kader yang mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dana tersedia, tetapi belum cukup untuk pelaksanaan di lapangan, dan sarana serta prasarana di puskesmas masih kurang memadai untuk penerjunan ke masyarakat. Rencana program sudah di susun oleh dinas kesehatan dan di sesuaikan dengan puskesmas, tetapi belum terwujud dengan baik. Pelaksanaan belum terkoordinasi dengan baik karena lemahnya perencanaan dan kurangnya kerja sama lintas sektor. Pengawasan hanya sebatas pemantauan laporan dan pembinaan, dengan rapat mengenai dengan program yang jarang di lakukan. Cakupan pelaksanaan program PHBS di tingkat rumah tangga belum mencapai target.

Penelitian serupa yang di lakukan Wulansari et al., (2018) yang juga mengkaji tentang Kinerja Dinas Kesehatan Dalam Program PHBS. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masalah yang teridentifikasi mencakup kurangnya pengawasan langsung dari dinas kesehatan terhadap puskesmas dan posyandu yang melaksanakan kegiatan PHBS, serta kurangnya koordinasi dan bimbingan dari dinas kesehatan. Selain itu, terdapat kurangnya pengawasan dan pembinaan langsung dari dinas kesehatan kepada masyarakat, dan kurangnya tenaga kesehatan yang berfokus pada promosi kesehatan.

Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Luthfiah et al (2023). Tentang pelaksanaan perilaku hidup bersih dan sehat pada pelayanan Kesehatan masyarakat. Dalam penelitian ini di temukan bahwa beberapa program PHBS telah berjalan sebagaimana mestinya, namun masih terdapat beberapa kendala yang di hadapi yaitu fasilitas kesehatan dan kurang jumlah tenaga kesehatan dan kebersihan.

Dari studi-studi terdahulu tergambar bahwa program PHBS belum optimal karena kurangnya dukungan kader, dana yang tidak mencukupi, dan sarana yang kurang memadai. Rencana program belum terwujud dengan baik karena lemahnya perencanaan dan kerja sama lintas sektor, serta kurangnya pengawasan, koordinasi dan bimbingan dari dinas Kesehatan dan kurangnya aktivitas fisik dan olahraga di tempat kerja.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti yaitu Listiawaty (2020) Fokusnya yaitu pelaksanaan program PHBS. Temuannya itu kurangnya tenaga kader, dana, sarana dan prasarana. Serta masalah lemahnya koordinasi dan pengawasan. Sedangkan menurut Wulansari (2018) Fokusnya yaitu kinerja dinas Kesehatan dalam program PHBS. Temuannya itu kurangnya pengawasan, koordinasi, dan bimbingan. Masalahnya yaitu kurangnya tenaga kerja kesehatan untuk promosi kesehatan. Selanjutnya penelitian oleh Luthfiah et al., (2023) Fokusnya yaitu

pelaksanaan program PHBS di pelayanan kesehatan masyarakat. Temuannya yaitu kinerja baik, tetapi sarana dan prasarana kurang. Serta masalah kurangnya aktivitas fisik dan olahraga rutin di tempat kerja.

Sedangkan peneliti berfokus pada kinerja puskesmas poleang dalam pelaksanaan program perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di kecamatan poleang kabupaten bombana memiliki perbedaan dalam Teori yang digunakan penelitian. Peneliti ini menggunakan teori Dwiyanto dalam Nugraha (2020), yang menekankan pada kinerja organisasi, yang mencakup indikator Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas. Serta Fokus Penelitian ini lebih spesifik dalam mengevaluasi kinerja puskesmas dalam pelaksanaan program PHBS di kecamatan poleang dengan menggunakan teori kinerja organisasi. Sedangkan temuan dan masalahnya itu peneliti ini kemungkinan akan mengidentifikasi permasalahan yang lebih spesifik terkait dengan kinerja puskesmas, termasuk efisiensi penggunaan sumber daya, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan observasi awal permasalahan yang terjadi dipoleang Kabupaten Bombana yaitu masih ada masyarakat yang membuang air besar sembarangan seperti di sungai, kebun dan di laut. Serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Program PHBS dimana masih banyak masyarakat berperilaku tidak sehat salah satunya merokok dalam rumah. Tindakan ini tidak hanya membahayakan kesehatan perokok itu sendiri, tetapi juga anggota keluarga lainnya yang menjadi perokok pasif. Program PHBS di puskesmas Poleang yaitu penyuluhan PHBS, pendataan PHBS rumah tangga dan pendataan PHBS sekolah.

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Mulyati, et al (2024), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis dan kata-kata yang diucapkan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan informan yaitu Perwakilan Puskemas Poleang Kabupaten Bombana, Perwakilan Pemerintah Kecamatan, Perwakilan Pemerintah kelurahan atau Desa, dan Perwakilan Masyarakat. Data yang digunakan yakni menggunakan data sekunder yang ada. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Kinerja puskesmas poleang dalam pelaksanaan program PHBS dianalisis menggunakan teori Dwiyanto dalam Nugraha (2020) yang menyebutkan lima indikator dalam menilai kinerja organisasi

Produktivitas

Menurut Dwiyanto dalam Nugraha (2020), produktivitas bukan sekedar rasio antara output dan input, melainkan harus dilihat seberapa aktif pelaksana mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat. Dalam konteks program perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), produktivitas diukur dari berbagai kegiatan, intensitas pelaksanaan, dukungan lintas sektor, serta manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Berdasarkan kinerja puskesmas poleang dalam pelaksanaan program perilaku hidup bersih dan sehat dikecamatan poleang kabupaten bombana terakit dengan peningkatan mutu Kesehatan masyarakat yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat akan pentingnya menjaga Kesehatan keluarga dan lingkungan untuk itu diperlukan kinerja nyata dari organisasi yang bertanggung jawab guna memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pelaksanaan program PHBS, sehingga masyarakat mengetahui tujuan dari pelaksanaan program yang dijalankan ditengah masyarakat.

Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup bersih dan sehat, mencegah penyakit, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Program ini juga bertujuan untuk membudayakan perilaku hidup sehat di kalangan individu, kelompok, dan masyarakat luas.

Untuk itu diperlukan kinerja nyata dari seluruh anggota organisasi dan Lembaga yang terlibat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pelaksanaan program PHBS, sehingga masyarakat dapat benar-benar memahami maksud dan tujuan dari setiap pelaksanaan program. Hal ini dilakukan agar masyarakat bukan hanya sekedar menjadi target program tetapi juga sebagai pelaksana program.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa puskesmas poleang telah melaksanakan berbagai kegiatan PHBS secara rutin dan berkesinambungan. Namun produktivitasnya masih menghadapi kendala akibat perilaku masyarakat yang sulit diubah. Peneliti melakukan wawancara dari pihak puskesmas, ibu TL 30th selaku tenaga promkes diperoleh informasi bahwa selama ini kegiatan PHBS yang sudah kami lakukan diantaranya penyuluhan PHBS di posyandu, kegiatan lomba PHBS tingkat desa dan kelurahan serta pemantauan jamban sehat di masyarakat, pembagian media edukasi, gotong royong, serta pendampingan rumah tangga sehat. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin, baik bulanan maupun pada momen tertentu, dan dilengkapi dengan survey rumah tangga terkait sarana air bersih, ASI eksklusif, penimbangan balita, serta kepemilikan jamban sehat. Produktivitas masih terkendala oleh kebiasaan masyarakat yang sulit diubah, terutama perilaku merokok didalam rumah, rendahnya pemahaman penggunaan jamban sehat, serta terbatasnya partisipasi dalam kegiatan penyuluhan”

Temuan ini menunjukkan bahwa produktivitas puskesmas poleang dalam pelaksanaan program PHBS telah berjalan secara terstruktur dan konsisten. Namun, hambatan dalam perubahan perilaku masyarakat menjadi faktor utama yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Dari pihak pemerintah kecamatan, produktivitas program PHBS juga terlihat melalui dukungan monitoring dan anggaran, meskipun terbatas. Peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu SH^{44th} selaku kasikesra mengatakan bahwa “Pihak kecamatan turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program PHBS yang dilakukan melalui keterlibatan dalam monitoring, kami biasanya hadir dalam kegiatan penyuluhan posyandu maupun mini loka karya. Selain itu, kecamatan juga memberikan dukungan anggaran meskipun terbatas, yang alokasikan untuk kegiatan penyuluhan, pertemuan lintas sektor, serta pemenuhan sarana dasar dalam pelaksanaan program”

Berikut adalah data yang penulis peroleh pada lokasi penelitian terakit dengan data aktivitas program PHBS.

Tabel 1. Data Aktivitas Program PHBS Tahun 2023-2024

No	Kegiatan	Pihak yang terakait	SDM yang terlibat	Insentitas Pelaksana	SDA
1	Penyuluhan	Puskesmas, posyandu, Kelurahan	Kepala puskesmas, petugas programer, bidan, kader	3 kali (2023) 5 kali (2024)	
2	Lomba PHBS Tingkat Kelurahan	Puskesmas, Kelurahan, Masyarakat	Tim penilai, kader, petugas puskesmas	1 kali (2023) 1 kali (2024)	Tahun 2023 Rp. 7.000.000.
3	Pemantauan jamban	Puskesmas, kelurahan	Petugas sanitarian, kader	2 kali (2023) 3 kali (2024)	
4	Pembagian media edukasi	Puskesmas, Kelurahan, Masyarakat	Petugas puskesmas, kader, masyarakat	3 kali (2023) 4 Kali (2024)	Tahun 2024 Rp. 9.000.000
5	Gotong royong	Puskesmas, kelurahan, masyarakat	Petugas puskesmas, kader, masyarakat	2 kali (2023) 3 kali (2024)	
6	Pendampingan rumah tangga sehat	Puskesmas, kelurahan, masyarakat	Petugas puskesmas, kader	3 kali (2023) 4 kali (2024)	

Sumber Data; Puskesmas Poleang 2023-2024

Berdasarkan data aktivitas program PHBS puskesmas poleang Tahun 2023-2024, terdapat enam kegiatan yang dilaksanakan, yaitu penyuluhan, lomba PHBS tingkat kelurahan, pemantauan jamban, pembagian media edukasi, gotong royong, dan pendampingan rumah tangga sehat. Kegiatan tersebut melibatkan kepala puskesmas, kelurahan, posyandu, kader, serta masyarakat dengan dukungan petugas program, bidan, dan sanitarian. Terjadi peningkatan intensitas kegiatan pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Penyuluhan meningkat dari 3 kali menjadi 5 kali, pemantauan jamban sehat dari 2 kali menjadi 3 kali, pembagian media edukasi dari 3 kali menjadi 4 kali, serta pendampingan rumah tangga dari 3 kali menjadi 4 kali. Lomba PHBS tetap dilaksanakan 1 kali setiap tahun. Jumlah masyarakat untuk kegiatan penyuluhan dari 60 orang menjadi 50 orang, lomba PHBS tingkat kelurahan dari 30 orang menjadi 35 orang, pemantauan jamban sehat dari 25 orang menjadi 40 orang, pembagian media edukasi dari 45 orang menjadi 55, gotong royong dari 50 orang jadi 70 orang, serta pendampingan rumah tangga sehat dari 35 orang menjadi 50 orang. Dari sisi anggaran, tahun 2023 didukung dana sebesar Rp.

7.000.0000 dan meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp. 9.000.000. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya penguatan pelaksanaan program PHBS di wilayah kerja puskesmas poleang.

Keterangan ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan program PHBS tidak hanya ditentukan oleh puskesmas sebagai pelaksana teknis, tetapi juga memerlukan dukungan lintas sektor, termasuk pemerintah kecamatan sebagai penggerak koordinasi dan pengawasan program. Sementara itu, dari pihak kelurahan, kegiatan PHBS juga dilaksanakan secara aktif melalui berbagai bentuk kegiatan. Ibu D^{50th} selaku sekretaris lurah dikelurahan boeara mengatakan bahwa “Dikelurahan kami kegiatan PHBS yang sering dilakukan yaitu penyuluhan, sosialisasi tentang mencuci tangan dengan sabun, penggunaan jamban sehat aktivitas olahraga rutin, serta tidak merokok dalam rumah”

Sementara itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap Ibu AW^{52th} selaku sekretaris lurah dikelurahan kastarib mengatakan bahwa “Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya bebas asap rokok, mengingat tingginya resiko paru-paru akibat paparan rokok. Selain itu setiap rumah tangga di dorong untuk membangun jamban sehat. Dalam pelaksanaan program ini kami bersinergi dengan pemerintah kabupaten melalui pemberdayaan masyarakat dan pengusulan program pembuatan jamban. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan program sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di rumah masing-masing”

Berikut adalah data yang penulis peroleh pada lokasi penelitian terakit dengan ketersediaan sumber daya penunjang dan pendukung dalam pelaksanaan program PHBS di kelurahan Boeara, Kelurahan boepinang barat, dan kelurahan kastarib poleang kabupaten Bombana:

Tabel 2. Sumber Daya Penunjang dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Program PHBS

No	Kelurahan	Bidan	Kader	Posyandu
1.	Kel. Boeara	1	10	2
2.	Kel Boepinang Barat	1	6	2
3.	Kel Kastarib	1	10	2

Sumber: Puskesmas Poleang 2025

Ketersediaan sumber daya ini menjadi faktor penting dalam menjaga produktivitas dan keberlanjutan kegiatan PHBS ditingkat kelurahan. Namun, perbedaan jumlah kader antar wilayah juga menunjukkan adanya variasi kapasitas pelaksanaan program dilapangan. Selanjutnya, dari pandangan masyarakat, peneliti juga melakukan wawancara terhadap Ibu S^{25th} selaku masyarakat kelurahan boeara terkait kegiatan PHBS yang dilakukan secara rutin setiap bulan dan memberikan manfaat nyata. mengatakan bahwa “Kegiatan PHBS dilingkungan kami biasanya dilakukan sebulan sekali, terutama melalui posyandu, yang paling terasa manfaatnya itu penyuluhan tentang cara mencuci tangan yang benar. Anak-anak jadi terbiasa cuci tangan sebelum makan dan setelah bermain, jadi lebih jarang sakit perut.

Selain itu, ibu N^{37th} masyarakat kelurahan boepinang barat juga menyampaikan “yang paling sering kami rasakan manfaatnya itu gotong royong bersih-bersih lingkungan bersama warga. Dengan adanya kegiatan tersebut, lingkungan jadi bersih, sampah tidak banyak berserakan, dan warga juga jadi lebih peduli menjaga kebersihan rumah dan sekitarnya”

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai informan, dapat disimpulkan bahwa produktivitas puskesmas poleang dalam pelaksanaan program PHBS tergolong cukup baik, karena telah mampu melaksanakan kegiatan secara konsisten dan terkoordinasi dengan berbagai pihak. Pihak puskesmas melaksanakan program secara rutin dan berkesinambungan melalui penyuluhan diposyandu, lomba PHBS, pemantauan jamban, pendampingan rumah tangga sehat, serta kegiatan gotong royong dimasyarakat. Produktivitas pelaksanaan ini didukung oleh pemerintah kecamatan dan kelurahan, baik dalam bentuk monitoring, dukungan anggaran yang terbatas, serta pelibatan lintas sektor. Selain itu, masyarakat juga merasakan manfaat nyata dari pelaksanaan kegiatan, seperti kesadaran mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, memahami pentingnya posyandu untuk Kesehatan anak dan ibu hamil.

Namun demikian, produktivitas program PHBS masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat, seperti kebiasaan merokok didalam rumah, rendahnya pemahaman penggunaan jamban, serta partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam kegiatan penyuluhan. Faktor-faktor ini menyebabkan hasil program belum sepenuhnya optimal meskipun kegiatan telah berjalan rutin.

Berikut Adalah data penulis peroleh pada lokasi penelitian terkait pelaksanaan program PHBS dikecamatan poleang, bedasarkan aspek pemenuhan jamban disetiap rumah tangga yang berada di tiga kelurahan:

Tabel 3. Jumlah Pemenuhan Jamban disetiap Kelurahan

No	Kelurahan	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jumlah Jamban
1	Kel. Boeara	1.496	425	380
2	Kel. Boepinang Barat	2.460	906	574

No	Kelurahan	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jumlah Jamban
3	Kel. Kastarib	2.226	498	495

Sumber: Puskesmas Poleang 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan jamban sehat belum merata diseluruh kelurahan. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam aspek infrastruktur pendukung PHBS yang dapat berpengaruh terhadap kualitas layanan secara keseluruhan, khususnya dalam mewujudkan rumah tangga sehat disetiap wilayah.

Temuan ini menunjukkan bahwa aspek produktivitas puskesmas poleang sejalan dengan Konsep Dwiyanto dalam Nugraha (2020) yang menekankan bahwa produktivitas lembaga publik tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga efisiensi yang berkelanjutan hasil kinerja terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, puskesmas poleang telah menunjukkan efisiensi pelaksanaan program melalui sinergi lintas sektor dan pemanfaatan sumber daya yang terbatas, namun belum sepenuhnya mencapai efektivitas hasil karena masih terdapat hambatan perilaku masyarakat sulit diubah dan keterbatasan partisipasi aktif masyarakat. Untuk mencapai produktivitas yang optimal sesuai konsep kinerja Dwiyanto dalam Nugraha (2020) diperlukan upaya intensif dalam membangun kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat, serta peningkatan dukungan sumber daya dan inovasi edukasi yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat poleang.

Kualitas Layanan

Kualitas layanan merupakan indikator utama dalam menilai kinerja organisasi publik, kualitas pelayanan dapat dinilai dari sejauh mana standar pelayanan diterapkan, kompetensi aparatur pelaksana, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Dalam konteks PHBS, kualitas layanan diukur melalui standar edukasi yang digunakan, kesiapan tenaga kesehatan, pemantauan program, serta respon masyarakat terhadap kegiatan penyuluhan.

Tujuan utama dari kualitas layanan program PHBS adalah untuk memberdayakan individu dan keluarga agar memiliki kesadaran dan kemampuan dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat secara mandiri. Program ini juga bertujuan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat serta mencegah berbagai penyakit melalui penerapan kebiasaan sehari-hari. Selain itu, PHBS berupaya menciptakan lingkungan rumah, sekolah, dan tempat kerja yang bersih dan nyaman, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam Gerakan kesehatan agar terbentuk budaya hidup sehat yang berkelanjutan.

Berikut wawancara dengan pihak puskesmas menunjukkan bahwa standar layanan PHBS dilakukan dengan menggunakan media edukasi yang mudah dijangkau masyarakat. Selain itu, kualitas layanan juga didukung oleh peningkatan kapasitas tenaga kesehatan serta dinilai berdasarkan indikator keberhasilan yang ditetapkan secara jelas. Bapak MH 45th selaku kepala puskesmas, mengatakan bahwa “upaya edukasi yang dilakukan dengan menempelkan media informasi seperti poster atau leaflet di tempat-tempat yang mudah terlihat oleh masyarakat agar pesan Kesehatan dapat tersampaikan secara efektif. Selain itu, kualitas layanan juga didukung oleh peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan di tingkat kabupaten. Indikator keberhasilan program PHBS dinilai secara jelas, antaranya terpenuhinya rumah sehat dengan tidak adanya aktivitas merokok didalam rumah ketersediaan sarana air bersih, penggunaan jamban sehat, kebiasaan mencuci tangan pakai sabun, pemberian ASI eksklusif, serta konsumsi makanan bergizi. Evaluasi keberhasilan program dilakukan melalui kegiatan posyandu, survey rumah tangga, maupun pelaporan kader Kesehatan.”

Keterangan ini menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan dan puskesmas dalam menjaga mutu layanan PHBS. Dukungan pemerintah kecamatan melalui monitoring dan pengawasan turut menjadi elemen penting dalam memastikan kualitas layanan tetap terjaga. Sementara itu, dari pihak kelurahan, respon masyarakat terhadap isi penyuluhan masih kurang baik karena banyak masyarakat belum memahami sepenuhnya materi yang disampaikan petugas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu D^{50th} selaku sekretaris lurah dikelurahan boeara mengatakan bahwa “Respon masyarakat terhadap isi penyuluhan PHBS sebenarnya masih kurang optimal. Masih banyak warga yang datang hanya karena diajak kader, tapi tidak benar-benar memahami isi penyuluhan. Selain itu cara penyampaian petugas juga kadang terlalu cepat dan menggunakan Bahasa yang sulit dimengerti, apalagi masyarakat pendidikannya rendah. Akibatnya, informasi yang disampaikan tidak semuanya bisa diterima dengan baik.”

Keterangan ini menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan komunikasi dalam penyampaian materi penyuluhan PHBS kepada masyarakat. Aspek bahasa, metode komunikasi, dan kesesuaian pendekatan menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas layanan kesehatan. Dari pandangan masyarakat cara penyampaian petugas belum sepenuhnya efektif, karena penjelasan yang diberikan terkadang sulit dipahami dan belum sepenuhnya bermanfaat bagi masyarakat. Ibu D^{40th} selaku masyarakat kelurahan boeara mengatakan bahwa “Menurut saya, cara petugas dalam menyampaikan

penyuluhan PHBS belum sepenuhnya efektif, karena terkadang bahasa yang digunakan masih kurang sederhana dan agak cepat, sehingga tidak semua masyarakat bisa langsung memahami maksudnya.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan puskesmas poleang dalam pelaksanaan program telah menunjukkan upaya yang cukup baik dan terstruktur. Puskesmas telah menggunakan media edukasi yang mudah dijangkau masyarakat seperti poster atau leaflet, serta meningkatkan kapasitas tenaga Kesehatan melalui pelatihan ditingkat kabupaten. Evaluasi program juga dilakukan secara rutin melalui posyandu, survei rumah tangga, dan pelaporan kader, dengan indikator keberhasilan seperti kepemilikan jamban, penggunaan air bersih, perilaku cuci tangan, dan pemberian ASI eksklusif. Dari sisi pemerintah kecamatan, layanan PHBS dinilai memadai dan merata tanpa adanya keluhan masyarakat, meskipun masih terdapat kekurangan seperti ketersediaan jamban di beberapa rumah tangga. Namun demikian, dari pihak kelurahan dan masyarakat terlihat bahwa efektivitas penyuluhan masih perlu ditingkatkan karena respon masyarakat terhadap kegiatan penyuluhan cenderung rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami materi akibat penggunaan Bahasa yang kurang sederhana, penyampaian terlalu cepat. Hambatan bahasa antara petugas dan masyarakat lokal juga turut memengaruhi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pesan PHBS. Dengan demikian, meskipun kualitas layanan secara struktural sudah baik, efektivitas komunikasi dan metode penyuluhan masih perlu diperkuat agar pesan kesehatan dapat tersampaikan dan diterapkan secara optimal oleh masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa aspek kualitas layanan puskesmas poleang sejalan dengan konsep Dwiyanto dalam Nugraha (2020) yang menekankan pentingnya profesionalisme, efisiensi, dan akuntabilitas dalam kinerja lembaga publik. Namun hambatan dalam penyampaian informasi dan rendahnya pemahaman masyarakat mencerminkan bahwa dimensi responsivitas dan partisipasi masih perlu diperkuat agar kinerja layanan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Responsivitas

Responsivitas merupakan indikator yang menilai sejauh mana organisasi publik mampu mengenali kebutuhan masyarakat serta menanggapi keluhan dengan cepat dan tepat. Responsivitas tidak hanya diukur dari ketersediaan layanan, tetapi juga dari kemampuan pelaksana untuk mendengarkan aspirasi masyarakat, menindaklanjuti keluhan, dan menyediakan saluran komunikasi yang mudah diakses. Dalam konteks PHBS, responsivitas Puskesmas Poleang terlihat dari bagaimana mereka merespon kebutuhan masyarakat, berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan atau desa, serta kecepatan petugas dalam menangani masalah di lapangan.

Tujuan dari responsivitas program PHBS adalah memastikan agar program berjalan secara efektif, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesehatan secara optimal. Selain itu, responsivitas memungkinkan adanya penyesuaian berkelanjutan terhadap perubahan kebutuhan dan tantangan kesehatan, sehingga efektivitas serta keberlanjutan program dapat terjaga. Dengan demikian, responsivitas berperan penting dalam menciptakan lingkungan sehat, aman, dan nyaman serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Berikut wawancara dengan pihak puskesmas yang menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat ditanggapi melalui edukasi dan pendampingan serta respon terhadap keluhan juga dilakukan secara tepat. Selain itu terdapat beberapa media komunikasi yang disediakan untuk menerima laporan. Ibu TL^{30th} selaku tenaga kesehatan promkes mengatakan bahwa “Edukasi diberikan melalui penyampaian informasi dan pendampingan kepada masyarakat agar mereka dapat memenuhi indikator PHBS, salah satunya kepemilikan jamban sehat yang masih belum dimiliki beberapa wilayah kerja puskesmas poleang. Respon terhadap keluhan masyarakat juga dilakukan secara cepat, dimana setiap keluhan ditanggapi langsung oleh pihak puskesmas agar permasalahan segera teratasi. Selain itu, tersedia berbagai media komunikasi untuk menampung masukan, seperti kotak saran, halaman facebook promkes, maupun aplikasi whatsapp yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan kapan saja.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak puskesmas, dapat dilihat bahwa upaya dalam menanggapi kebutuhan dan keluhan masyarakat telah dilakukan dengan cukup baik, melalui berbagai media komunikasi dan mekanisme pelayanan yang cepat. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai tingkat responsivitas, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak kecamatan dalam mendukung kebutuhan puskesmas dengan koordinasi lintas sektor.

Hasil wawancara dengan pihak kecamatan menunjukkan bahwa puskesmas poleang dinilai cukup tanggap dalam merespon berbagai keluhan dan kebutuhan masyarakat, terutama melalui koordinasi lintas sektor yang berjalan secara rutin. Namun untuk memperkuat analisi dan melihat pelaksanaan program, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak kelurahan yang menilai pelaksanaan program PHBS belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ibu D^{50th} selaku sekretaris lurah dikelurahan boera mengatakan bahwa “Pemerintah kelurahan menilai bahwa responsivitas

puskesmas poleang dalam menanggapi kebutuhan masyarakat masih belum optimal, karena tindak lanjut terhadap permintaan atau kendala masyarakat sering terlambat akibat koordinasi yang lambat.”

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak kelurahan dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kendala dalam hal kecepatan dan efektivitas tanggapan puskesmas terhadap berbagai kebutuhan masyarakat. Untuk itu peneliti juga melakukan wawancara terhadap masyarakat terkait petugas puskesmas yang dinilai belum sepenuhnya cepat dalam merespon masalah kesehatan. Beberapa masyarakat mengaku bahwa ketika menyampaikan keluhan atau permintaan tindak lanjut, petugas sering membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menanggapi. Masyarakat berharap agar kedepan petugas bisa proaktif. Ibu S^{25th} selaku Masyarakat kelurahan boeara mengatakan bahwa “Respon petugas puskesmas dinilai belum terlalu maksimal, karena Ketika terjadi masalah Kesehatan seperti anak demam tinggi, petugas sering terlambat merespon dan terkadang hanya memberikan arahan melalui telepon tanpa segera melakukan kunjungan dilapangan. Masyarakat merasa bahwa penanganan seperti ini kurang maksimal, terutama bagi Masyarakat yang membutuhkan tindakan cepat. Selain itu keterbatasan tenaga Kesehatan dilapangan juga membuat pelayanan menjadi lambat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, dapat disimpulkan bahwa responsivitas puskesmas poleang dalam pelaksanaan program PHBS meunjukkan upaya yang cukup baik namun efektivitasnya masih terhambat oleh kurangnya kecepatan dalam tindak lanjut, koordinasi yang belum optimal, serta keterbatasan sumber daya manusia. Dari pihak puskesmas, pelayanan telah diarahakan untuk menanggapi kebutuhan masyarakat melalui edukasi, pendampingan, serta respon cepat terhadap keluhan yang disampaikan masyarakat. Puskesmas juga telah menyediakan berbagai media komunikasi seperti kotak saran, halaman facebook promkes, dan aplikasi Whatspp agar masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan masukan atau keluhan. Dari pihak kecamatan responsivitas puskesmas dinilai cukup baik dan tanggap, terlihat dari koordinasi lintas sektor yang dilakukan secara rutin melalui forum rapat dan pertemuan bersama antara kecamatan, puskesmas, dan kelurahan. Bentuk koordinasi ini membantu mengantisipasi permasalahan yang muncul, terutama dalam penyediaan jamban sehat dan kebutuhan dasar masyarakat. Namun, dari pihak kelurahan ditemukan bahwa tindak lanjut terhadap kebutuhan masyarakat belum optimal, karena proses penyelesaian masalah sering terlambat akibat koordinasi antara pihak belum sepenuhnya afektif. Sementara itu, dari pihak masyarakat bahwa respon petugas puskesmas masih kurang cepat dan belum sepenuhnya proaktif. Beberapa warga mengeluhkan keterlambatan petugas dalam menindaklanjuti laporan, terutama pada kasus-kasus yang mendesak seperti penyakit yang memerlukan penanganan segera. Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga kesehatan juga menjadi penyebab lambatnya respon terhadap masalah dilapangan seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah.

Temuan ini menunjukkan bahwa aspek responsivitas puskesmas poleang sejalan dengan konsep Dwiyanto dalam Nugraha (2020), yang menekankan pentingnya kemampuan organisasi publik dalam menyesuaikan diri dan menanggapi kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan adaptif. Namun, hambatan berupa keterlambatan respon dan koordinasi yang belum optimal mencerminkan bahwa aspek responsivitas belum sepenuhnya terelisasi. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan mekanisme koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar kinerja puskesmas lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan Masyarakat.

Responsibilitas

Responsibilitas menjelaskan bahwa terkait dengan kemampuan organisasi publik menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), responsibilitas Puskesmas Poleang dapat dilihat dari sejauh mana puskesmas dan mitra kerja di tingkat kecamatan, kelurahan, serta masyarakat menjalankan peran masing-masing secara konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuannya untuk mendorong individu dan masyarakat agar memiliki kesadaran, pengetahuan, dan tanggungjawab dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan kesehatan, serta berkontribusi menciptakan lingkungan yang sehat demi peningkatan kualitas hidup bersama.

Bedasarkan hasil wawancara dengan pihak puskesmas, diketahui bahwa pelaksanaan PHBS telah diatur dalam SOP dan melibatkan berbagai pihak sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing, serta menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mendukung keberhasilan program. Bapak MH^{45th} selaku kepala puskesmas mengatakan bahwa “Pelaksanaan PHBS telah diatur dalam SOP, pelaksanaan program PHBS juga melibatkan berbagai pihak, antara lain programmer Kesehatan yang bertanggungjawab dalam penyampaian materi mengenai PHBS, termasuk pemantauan pertumbuhan balita serta edukasi gizi. Sementara itu, aparat pemerintah setempat berperan dalam memfasilitasi kegiatan dan membantu koordinasi dengan masyarakat diwilayah masing-masing. Dalam pelaksanaanya, puskesmas selalu malakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan,

dimana kelurahan berperan dalam menginformasikan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, sedangkan kecamatan memberikan dukungan dan memfasilitasi kerja sama lintas sektor seperti dengan sekolah dengan sekolah, dan masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak puskesmas, terlihat bahwa pelaksanaan program PHBS dipoleang telah berjalan sesuai dengan pedoman dan standar operasional yang berlaku. Selain dari pihak puskesmas, peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak kecamatan terkait puskesmas poleang yang dinilai telah melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan secara formal melalui laporan kegiatan dan rapat koordinasi. Ibu D^{50th} selaku sekretaris kelurahan boeara mengatakan bahwa “Pemerintah kelurahan berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program PHBS dengan memfasilitasi kegiatan penyuluhan, menggerakkan kader posyandu, serta memberikan arahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Koordinasi pihak puskesmas juga dilakukan secara rutin melalui pertemuan bulanan yang membahas program Kesehatan, termasuk PHBS sekaligus melakukan evaluasi agar pelaksanaan dilapangan dapat berjalan lebih maksimal.”

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak kelurahan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program PHBS telah melibatkan berbagai unsur termasuk kader kesehatan dan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan koordinasi rutin. Namun demikian, dari sisi masyarakat sebagai penerima manfaat langsung, petugas dinilai belum sepenuhnya konsisten dan kurang cepat dalam menindaklanjuti keluhan yang disampaikan. Ibu D^{42th} selaku masyarakat kelurahan boeara mengatakan bahwa “Menurut saya, petugas sebenarnya belum maksimal dalam menjalankan tugasnya, memang mereka kadang malakukan penyuluhan diposyandu. Selain itu, beberapa keluhan Masyarakat juga tidak langsung ditindaklanjuti sehingga kami merasa perhatian dari petugas kurang.”

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai pihak, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program perilaku hidup bersih dan sehat dipuskesmas poleang telah dilaksanakan sesuai dengan standal operasional prosedur dan melibatkan berbagai pihak lintas sektor seperti tenaga kesehatan, pemerintah kecamatan, dan pemerintah kelurahan. Koordinasi antar pihak dinilai berjalan cukup baik, tercermin dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pendataan rumah tangga, posyandu, serta evaluasi rutin melalui rapat koordinasi. Pemerintah kelurahan juga berperan aktif dalam memfasilitasi kegiatan, menggerakkan kader posyandu, serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan PHBS ditingkat masyarakat. Dari sisi masyarakat, masih ditemukan kendala yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal. Beberapa masyarakat menilai bahwa petugas belum konsisten dalam pendampingan dan terkadang lambat dalam menindaklanjuti keluhan, sehingga perhatian terhadap kebutuhan masyarakat belum merata disemua wilayah. Namun demikian, perlukan peningkatan dalam aspek konsistensi pelayanan dan kecepatan respon terhadap keluhan masyarakat agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Temuan ini menunjukkan bahwa aspek responsibilitas puskesmas poleang sejalan dengan konsep Dwiyanto dalam Nugraha (2020) yang menekankan efisiensi dan keberlanjutan kinerja Lembaga publik sebagai bagian dari tanggung jawab organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan program yang mengikuti SOP, adanya mekanisme pelaporan dan koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menunjukkan bentuk tanggung jawab dan profesionalisme aparatur publik dalam menjalankan fungsi pelayanan. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan berupa rendahnya konsistensi dan partisipasi masyarakat, yang menunjukkan bahwa aspek responsibilitas belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan peningkatan agar pelaksanaan program PHBS benar-benar berorientasi pada kebutuhan Masyarakat serta berkelanjutan dalam jangka Panjang.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan indikator penting dalam menilai kinerja organisasi publik. Dwiyanto dalam Nugraha (2020) menjelaskan bahwa akuntabilitas berkaitan dengan sejauh mana lembaga publik dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan keputusan yang diambil, baik kepada otoritas yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat sebagai penerima layanan. Dalam konteks pelaksanaan program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), akuntabilitas mencakup pelaporan kegiatan secara formal, transparansi informasi, keterlibatan masyarakat, serta adanya mekanisme evaluasi yang jelas. Tujuannya untuk memastikan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan program dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, sehingga peningkatan efisiensi dan efektivitas program secara menyeluruh.

Berikut hasil wawancara dari pihak puskesmas mengenai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan PHBS dilakukan melalui mekanisme pelaporan yang terstruktur, dimana laporan kegiatan disampaikan kepada berbagai pihak, serta disertai dengan evaluasi internal yang dilakukan secara rutin. Ibu TL^{30th} selaku tenaga Kesehatan promkes mengatakan bahwa “Pertanggungjawaban puskesmas terhadap pelaksanaan program PHBS dilakukan melalui penyusunan laporan kegiatan secara berkala

kepada dinas kesehatan kabupaten sebagai bentuk pertanggungjawaban utama, yang disampaikan kepada pihak kecamatan dan kelurahan. Setiap kegiatan seperti penyuluhan dan pendataan rumah tangga didokumentasikan serta diinformasikan kepada masyarakat melalui forum posyandu atau musyawarah kelurahan agar transparansi tetap terjaga. Selain itu, evaluasi internal dilakukan melalui rapat rutin bulanan, dimana penanggung jawab program memaparkan capaian, kendala, dan hasil kegiatan yang kemudian dibahas lebih lanjut dalam forum mini loka karya lintas sektor sebagai bentuk koordinasi.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak puskesmas, dapat diketahui bahwa mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan program PHBS telah berjalan secara sistematis melalui penyusunan laporan kegiatan. Selain dari pihak puskesmas, peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak kecamatan terkait akuntabilitas puskesmas terlihat dari pelaporan formal yang dibuat, sementara pengawasan dilakukan secara kondisional sesuai kebutuhan. mengenai transparansi, pihak kecamatan menilai bahwa pelaporan yang disampaikan oleh puskesmas sudah cukup jelas dan mudah dipahami. Ibu SH^{44th} selaku kasi kesra mengatakan bahwa “puskesmas membuat laporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan program yang mencakup seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Pengawasan dari pihak kecamatan dilakukan secara kondisional sesuai kebutuhan dan menilai transparansi pelaporan puskesmas dinilai cukup baik karena setiap kegiatan terdokumentasi dengan jelas serta dibahas dalam forum koordinasi.”

Dari sisi pemerintah kelurahan menyatakan bahwa mereka dilibatkan dalam kegiatan monitoring serta menerima laporan pelaksanaan program, dimana transparansi menjadi salah satu aspek penting yang turut dirasakan. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak kelurahan boera Ibu D^{50th} selaku sekretaris lurah mengatakan bahwa “Kami dari pihak kelurahan memang dilibatkan dalam monitoring kegiatan PHBS, biasanya diminta mendampingi petugas puskesmas saat melakukan pemantauan dilapangan sekaligus memberikan laporan. Selain itu, terdapat transparansi karena pihak puskesmas selalu turun langsung ke kelurahan dan berkoordinasi mengenai tujuan, sasaran, serta bentuk kegiatan sehingga pihak kelurahan dapat ikut memantau pelaksanaannya.”

Dari sisi masyarakat, sebagian menyatakan pernah diajak berdiskusi terkait program PHBS, sementara sebagian lainnya hanya menerima informasi. Mengenai transparansi hasil kegiatan, masyarakat menilai informasi disampaikan secara terbuka, meskipun masih ada yang menyebut bahwa penyampaiannya belum merata diseluruh wilayah. Ibu S^{25th} selaku masyarakat boera mengatakan bahwa “Saya pernah diajak berdiskusi saat pertemuan dikelurahan untuk memberikan masukan tentang kebersihan lingkungan, dan hasil kegiatan juga disampaikan secara terbuka melalui pertemuan diposyandu.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas puskesmas poleang dalam pelaksanaan program PHBS telah diterapkan dengan baik melalui mekanisme pelaporan yang terstruktur dan transparan. Pertanggungjawaban dilakukan secara formal melalui penyusunan pelaporan kegiatan yang disampaikan kepada Dinas Kesehatan kabupaten, pihak kecamatan dan kelurahan, serta disertai dengan evaluasi internal rutin yang dilaksanakan melalui rapat bulanan dan forum mini loka karya lintas sektor. Hal ini menunjukkan bahwa puskesmas memiliki sistem kerja terencana, terbuka, dan berorientasi kepada perbaikan berkelanjutan. Dari pihak kecamatan dan kelurahan, akuntabilitas juga dinilai cukup baik karena pelaporan dilakukan secara terbuka dan terdokumentasi dengan jelas. Pihak kelurahan terlibat aktif dalam proses monitoring kegiatan serta menerima tembusan laporan secara rutin yang memungkinkan mereka ikut memantau capaian dan kendala pelaksanaan program dilapangan. Namun, dari sisi Masyarakat masih terdapat kesenjangan dalam persepsi transparansi, dimana sebagian masyarakat merasa telah dilibatkan melalui diskusi dan pertemuan, sementara sebagian lainnya hanya menerima informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat belum merata disemua wilayah dan perlu penguatan dalam aspek partisipasi masyarakat dan pemerataan informasi dalam mendukung keberhasilan program dan dapat meningkat.

Temuan ini menunjukkan bahwa aspek akuntabilitas puskesmas poleang sejalan dengan konsep Dwiyanto dalam Nugraha (2020) yang menekankan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan kinerja lembaga publik melalui mekanisme pertanggungjawaban yang jelas serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pelaksanaan pelaporan formal, evaluasi berkala, dan keterbukaan informasi menunjukkan bahwa puskesmas poleang telah menjalankan prinsip good governance dalam penyelenggaraan layanan publik. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan berupa rendahnya partisipasi Masyarakat dan belum meratanya keterlibatan publik, yang menandakan bahwa akuntabilitas belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan partisipasi masyarakat serta optimalisasi komunikasi dua arah agar pelaksanaan program PHBS dapat inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Kinerja puskesmas poleang dalam pelaksanaan program PHBS dikecamatan poleang menunjukkan capaian yang cukup baik pada aspek produktivitas, kualitas layanan, serta tanggung jawab melalui kegiatan penyuluhan rutin, penerapan SOP, dan kolaborasi lintas sektor, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya merata diseluruh wilayah. Responsivitas puskesmas juga terlihat melalui mekanisme pengaduan dan media komunikasi yang tersedia, namun keterbatasan koordinasi serta kapasitas sumber daya manusia menghambat ketepatan tindak lanjut layanan. Sementara itu, akuntabilitas telah dilaksanakan melalui pelaporan formal dan evaluasi rutin, tetapi partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi masih rendah sehingga transparansi belum sepenuhnya inklusif. Secara keseluruhan, kinerja puskesmas poleang telah memenuhi beberapa indikator kinerja organisasi menurut Dyiwanto namun belum optimal dalam aspek inovasi pelayanan, pemerataan layanan, dan pelibatan masyarakat, sehingga menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan PHBS sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya, konsistensi pelaksanaan, serta pola komunikasi dan kolaborasi lintas sektor. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Perlu mengembangkan inovasi dalam metode penyuluhan dan edukasi masyarakat, misalnya melalui media digital, video edukatif, atau kegiatan berbasis komunitas agar penyampaian pesan PHBS lebih menarik dan mudah dipahami.
- b. Meningkatkan kecepatan dan respons terhadap keluhan masyarakat melalui sistem komunikasi dan tindak lanjut yang terintegrasi antar tenaga kesehatan dan kader.
- c. Mengoptimalkan peran kader kesehatan sebagai mitra aktif dalam pemantauan dan pendampingan masyarakat di tingkat kelurahan dan desa.
- d. Menetapkan kebijakan evaluasi berbasis kinerja yang transparan dan partisipatif guna meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik bidang kesehatan.
- e. Masyarakat diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan PHBS dan turut mengawasi jalannya program sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap pelayanan public dan Diperlukan peningkatan kesadaran kolektif tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat agar perubahan perilaku dapat terwujud secara berkelanjutan.

E. Referensi

- Hendrianti, E., Mt, M., Nuswantoro, I. W., Supriadi, M. T., Ardiyanto, M., & Gai, M. S. (2024). *Buku Referensi SANITASI PEMUKIMAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KESEHATAN MASYARAKAT*. PT. Media Penerbit Indonesia. <https://mediapenerbitindonesia.com>
- Herlina, Lisnawati, & Muhammad Arsyad. (2018). Peran Puskesmas Dalam Program Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Tatanan Rumah Tangga Di Kelurahan Padaidi Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 1(1), 42–52. <https://doi.org/10.31850/makes.v1i1.102>
- Kemensos, R. I. (2020). Perilaku hidup bersih dan sehat (phbs) penguatan kapabilitas anak dan keluarga. *Penguatan Kapabilitas Anak Dan Keluarga*, 1–14.
- Kurnia, L., & Edwar, A. (2022). Analisis Manajemen Pelaksanaan Program Promosi Kesehatan Dalam Program Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs) Tatanan Rumah Tangga Di Uptd Puskesmas Dtp Bandar Tahun 2023 Mustika. *Tjyybjb.Ac.Cn*, 27(2), 58–66. <http://117.74.115.107/index.php/jemasi/article/view/537>
- Listiawaty, R. (2020). Analisis Pelaksanaan Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Tatanan Rumah Tangga di Wilayah Kerja Puskesmas X. *Journal of Health Science and Physiotherapy*, 2(2), 134–142.
- Luthfiah, M., Aidha, Z., Khairunnisa, S. A., Aminah, S., Anggraini, Y., & Hayati, Z. (2023). Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Tuntungan 1 Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 885–895.
- Mulyati, Ely. Madina, La Ode. Baso, Sudirman. Harahap, Lutfi Henderlan. 2024. Metode Penelitian. PT Media Penerbit Indonesia. Meda.
- Nasution, A. S. (2020). Edukasi PHBS di Tatanan Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Perilaku Sehat. *Jurnal Abdidas*, 1(2), 28–32. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v1i2.9>
- Nugraha, M. E. S. (2020). Pengaruh Kinerja Pegawai Terhadap Efektivitas Organisasi Pada Kantor Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten barito selatan: The Effect of Employee Performance on Organizational Effectiveness in the Kecamatan Dusun Selatan Office of Selatan Barito District. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi*, 6(2), 82–90.
- Nurhajati, N. (2015). Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat Desa Samir dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. *Publiciana*, 8(1), 107–126.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/2011 Tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Wulansari, S., Fuad, A., & Riswanda, R. (2018). *Kinerja Dinas Kesehatan Dalam Program Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs) Dalam Tatanan Rumah Tangga Di Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang (Studi Kasus Kesehatan Lingkungan)*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.